

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena pendidikan sebagai pencipta sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap suatu kemajuan. Pendidikan juga sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya maupun masyarakat. Secara sederhana pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir (M. Damopoli, 2015).

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Namun, pada saat ini banyak masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini disebabkan karena mahalnya biaya Pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha pembelajaran berupa pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan. Pendidikan merupakan pembelajaran yang dialami langsung dalam lingkungan hidup. Pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan (Nasution, 2017). Suatu wadah untuk memfasilitasi kebutuhan serta keinginan masyarakat dalam menggali ilmu pengetahuan disebut dengan sekolah.

Masyarakat Indonesia tentu sudah tahu betapa pentingnya pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan suatu modal yang kita miliki untuk hidup dizaman yang serba modern dan sulit ini. Sebagaimana yang diungkapkan Daoed Joesoef tentang pentingnya pendidikan: "Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia". Kita bisa mengambil kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak mudah lepas dari kehidupan (Muflihini, 2020).

Salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia yaitu menjadi bangsa yang maju. Faktor Pendidikan menjadi salah satu rahasia umum terhadap maju atau tidaknya suatu negara. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu pendidikan dapat di ukur apakah bangsa itu maju atau mundur, karena seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill serta pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Bisa dibayangkan apabila output dari proses pendidikan ini gagal bagaimana bisa mencapai kemajuan.

Bagi suatu bangsa yang ingin maju, Pendidikan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan yang sama halnya dengan kebutuhan lainnya. Disisi lain pendidikan dasar juga memiliki tujuan yaitu untuk memberikan lokal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara yang baik serta menyiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah atau yang lebih tinggi (Adawiah, 2017).

Melihat betapa pentingnya pendidikan di Indonesia pada zaman yang serba modern ini maka dari itu pendidikan juga harus dijunjung dengan pendanaan agar pendidikan tersebut dapat memiliki kualitas yang tinggi salah satunya yaitu dana BOS. Dana BOS dapat meningkatkan kualitas Pendidikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan melalui dana BOS dapat dilakukan dengan: (1) melakukan berbagai pelatihan, kecakapan untuk meningkatkan kualitas guru sehingga dapat berpengaruh kepada pengetahuan siswa, (2) perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, (3) peningkatan hingga kualitas tata Kelola pendidikan di sekolah tersebut (Bakti, 2020).

Efektivitas pengelolaan keuangan merupakan salah satu wewenang sekolah dan diharapkan dana yang beredar dapat dimanfaatkan dengan optimal. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal penting dalam setiap organisasi, karena pengelolaan keuangan yang baik akan sangat membantu memperlancar segala aktivitas organisasi.

(Purnama & Atmadja, 2020). Selain itu, pemerintah juga memberikan kewenangan agar sekolah dapat mencari sumber keuangan dengan tujuan menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kegiatan ini disebut kegiatan pendanaan pendidikan (Kartini Putri & Tungga Atmadja, 2021).

Keefektifan pengelolaan dana BOS terletak pada: (1) Efektivitas keseluruhan (2) efisiensi, (3) kepuasan, (4) melakukan penilaian oleh pihak luar. Ketersediaan anggaran dan penggunaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran, menggunakan prosedur perencanaan dengan sistem yang menggambarkan bahwa manajemen anggaran dilakukan untuk memenuhi target dan sasaran yang ditetapkan. Strategi anggaran ini menjadi jaminan bahwa efektivitas anggaran yang di fokuskan pada aktivitas pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan yang di programkan (Fadila et al., 2020)

Sekolah sebagai satuan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sistem belajar mengajar juga terdiri dari tiga tahapan, yaitu (1) input, dimana kondisi peserta didik yang belum mempunyai keterampilan dan pengetahuan khusus, (2) transformasi, yaitu kondisi yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam pendidikan yaitu terjadinya proses kegiatan Belajar Mengajar (KMB), (3) output, adalah hasil dari proses yang diharapkan. Apabila proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan maka akan menghasilkan output yang berkualitas yaitu tenaga kerja. Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang menuntut peningkatan mutu pendidikan. Sekolah diharapkan dapat merancang dengan relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada serta dengan tahap pendidikan yang formal, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) (Ahdan et al., 2020).

Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP adalah jenjang pendidikan formal dasar di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Saat ini SMP menjadi program Wajar 9 Tahun (SD, SMP). Lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (atau sederajat). Pelajar sekolah menengah pertama umumnya berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah menengah pertama negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota (Shah & Rakhmadi, 2022).

Pemerintah memberikan perhatian penuh bagi setiap lembaga pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berkualitas dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua masyarakat maka pemerintah mengupayakan dengan menyelenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana yang diperoleh dari pemerintah akan disalurkan kepada setiap instansi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sasaran program pemerintah ini pada umumnya untuk pembiayaan atau pendanaan kebutuhan sekolah bagi satuan pendidikan yang disalurkan ke semua sekolah dengan tujuan mutu pendidikan yang semakin meningkat. Seluruh dana BOS yang diterima sekolah merupakan tanggung jawab sekolah dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Setiap penggunaan dari anggaran dana bantuan operasional sekolah di pertanggungjawabkan dengan melaporkan dana BOS kemudian disetor ke kantor Dinas Pendidikan dan setiap pertanggungjawabannya direkap dan dicatat sesuai prosedur dalam penggunaan program dana BOS (Sjioen & Ludji, 2020).

Sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah menjelaskan bahwa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya menyediakan pendanaan biaya operasional non personalia pada satuan pendidikan, yang menyasar seluruh SD/SDLB dan SMP/SMPLB, termasuk Sekolah Dasar Satu Atap (SATAP) baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, dana BOS dikeluarkan empat triwulan selama satu tahun (satu periode), berdasarkan prosedur kebutuhan dana BOS. Prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. “Yaitu tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai” (Teknologi, 2022).

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis), pengelolaan Dana BOS juga melibatkan beberapa tim yang saling bekerja sama, antara lain Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota. Anggota tersebut terdiri atas satu orang dari unsur guru, 1 orang dari unsur komite sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua peserta didik yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, maka dengan mudah sekolah menjadikannya sebagai tumpuan proses pelaksanaan program dana BOS, agar nantinya sekolah tidak keluar dari penyimpangan dan ketentuan lainnya, sehingga pengelolaan dana BOS dapat dikatakan efektif (Teknologi, 2022).

Kebijakan dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait ketidak efektifan pengelolaan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Melihat dari beberapa informasi yang didapat ada sekolah yang tidak melakukan pengelolaan Dana BOS dengan benar atau sesuai ketentuan yang

berlaku. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS.

Pada pengelolaan Dana BOS yang ada disekolah apakah semua sekolah melakukan hal yang sama atau tidak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul: Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada SMP Negeri 02 Tekung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penulisan proposal penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada SMP Negeri 2 Tekung?”

1.3 Tujuan

Sudah dipastikan bahwa setiap pekerjaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan penelitian ini memiliki tujuan yaitu: “Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada SMP Negeri 2 Tekung.”

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang terkait dengan efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditinjau dari prinsip swakelola dan partisipatif,

transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya.

2. **Manfaat Praktis**

a. **Bagi Mahasiswa**

1) Mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah secara transparan dan akuntabel.

b. **Bagi Sekolah**

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih efektif dan efisien.